



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KESEHATAN  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : VALENTINUS RUDY HARTONO
2. Jabatan : INSPEKTUR INVESTIGASI
3. NHK : 71242

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.204.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 321 m<sup>2</sup>/150 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m<sup>2</sup>/36 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 254.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 294.000.000

1. MOTOR, HONDA CB 150 R Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO TECHNO 150 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
3. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 68.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO TECHNO 125 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO TECHNO Tahun 2016, LAINNYA Rp. 9.500.000
6. MOBIL, HONDA CR-V Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
7. MOTOR, HONDA VARIO TECHNO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 10.600.000

**D. SURAT BERTAHAP** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.508.512.292



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.017.112.292
III. HUTANG	Rp.	10.627.139
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.006.485.153

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.